



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

**LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018**



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI
Jl. RM Noor Atmadibrata No.2 Telanai Pura Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasihNya sehingga Laporan Keuangan Ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 ini adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dalam Laporan Keuangan ini memuat informasi kinerja keuangan yang menggambarkan capaian realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan di tahun anggaran 2018.

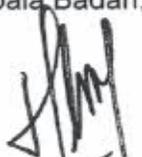
Laporan keuangan memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu *pertama*, merupakan media pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada pihak terkait, *kedua*, laporan keuangan ini merupakan informasi bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sendiri sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan rujukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran guna terwujudnya peningkatan kinerja organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan keuangan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik serta saran yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Jambi,

2018

A. Kepala Badan,



H. HUSAIRI, S. IP, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 196412011985031008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR GRAFIK	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vii
NERACA	viii
LAPORAN OPERASIONAL	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	x
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	1
2.1. Ekonomi Makro.....	1
2.2. Kebijakan Keuangan.....	1
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	1
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ..	1
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target Yang Telah Ditentukan.....	1
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	11
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	19
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	20
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan.....	20
5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	20
5.1.2 Neraca	24
5.1.3 Laporan Operasional	29
5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas	31
5.2. Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul Sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.....	32
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON- KEUANGAN	33
BAB VII PENUTUP	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2018 12
Tabel 3.2	Porsi Anggaran Belanja Perjenis Belanja 14
Tabel 5.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2018 21
Tabel 5.1.1.2.1.1	Belanja Pegawai 22
Tabel 5.1.1.2.2	Belanja Modal 20
Tabel 5.1.2.1	Rincian Aset..... 24
Tabel 5.1.2.1.1	Rincian Aset Lancar 26
Tabel 5.1.4.1.3	Nilai Buku Aset Tetap 27
Tabel 5.1.4.1.4	Rincian Aset Lainnya 28
Tabel 5.1.3.1	Rincian Realisasi Pendapatan-LO 30
Tabel 5.1.3.2	Rincian Realisasi Beban Operasi 30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2018
- Lampiran 2 SPJ Belanja – Fungsional TA 2018
- Lampiran 3 Berita Acara Pemeriksaan Kas 2018
- Lampiran 4 Berita Acara Pemeriksaan Persediaan 2018
- Lampiran 5 SPJ Utang Belanja Jasa Kantor 2018
- Lampiran 6 STS Pengembalian Belanja 2018

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Target dan Realisasi TA 2018	13
Grafik 3.2a Porsi Alokasi Anggaran TA 2018 Perjenis Belanja	15
Grafik 3.2b Porsi Realisasi Anggaran TA 2018 Perjenis Belanja	15
Grafik 5.1.2.1 Perbandingan Aset Per 31 Desember 2018 dan 2017 ...	25

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran;(b) Neraca; (c) Laporan Operasional;(d) Laporan Perubahan Ekiutas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direviu oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi,

2018

 Kepala Badan

H. HUSAIRI, S. IP, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19641201 198503 1 008

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017



Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4.05
 Unit Organisasi : 4.05.01
 Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Kepegawalan
 Badan Kepegawaian Daerah
 Badan Kepegawaian Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	BELANJA	19.683.056.428,00	17.454.909.557,00	88,68	18.840.667.976,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.878.497.228,00	16.686.555.957,00	88,39	18.218.904.918,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.783.056.428,00	10.852.018.078,00	84,89	10.844.413.851,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.095.440.800,00	5.834.537.879,00	95,72	7.374.491.067,00
5.2	BELANJA MODAL	804.559.200,00	768.353.600,00	95,50	621.763.058,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.818.000,00	511.193.600,00	93,49	471.813.058,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.741.200,00	257.160.000,00	99,77	149.950.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.683.056.428,00)	(17.454.909.557,00)	88,68	(18.840.667.976,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.683.056.428,00)	(17.454.909.557,00)	88,68	(18.840.667.976,00)

Jambi, 31 Desember 2018
KEPALA BADAN

H. HUSAIRI, SIP, ME
 NIP. 19641201198031008



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 01	Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01	Badan Kepegawaian Daerah

URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	3.226.400,00	2.512.120,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.226.400,00	2.512.120,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
penyisihan piutang dana bergulir dari investasi non permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH penyisihan piutang dana bergulir dari investasi non permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.696.201.879,30	4.108.567.097,30
Gedung dan Bangunan	925.437.617,00	670.527.617,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.582.000,00	49.582.000,00
Aset Tetap Lainnya	19.750.000,00	19.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.933.258.962,87)	(3.567.651.868,17)
JUMLAH ASET TETAP	1.757.712.533,43	1.280.774.846,13
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	273.451.615,00	273.451.615,00
Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

URAIAN	2018	2017
JUMLAH ASET LAINNYA	273.451.615,00	273.451.615,00
JUMLAH ASET	2.034.390.548,43	1.556.738.581,13
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	36.295.577.533,00	18.840.667.976,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor	13.375.094,00	11.250.176,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36.308.952.627,00	18.851.918.152,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	36.308.952.627,00	18.851.918.152,00
EKUITAS		
EKUITAS	(34.274.562.078,57)	(17.295.179.570,87)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.034.390.548,43	1.556.738.581,13

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	Kenaikan/ (Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan)
	Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.05 Unit Organisasi : 4.05.01 Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01						
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah						
	KEGIATAN OPERASIONAL						
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	17.004.591.215,44	18.502.399.074,58	(1.497.807.859,14)	(8,10)		
9.1.1	Beban Pegawai - LO	10.864.018.078,00	10.844.413.851,00	19.604.227,00	0,18		
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.823.948.517,00	7.370.318.344,00	(1.546.369.827,00)	(20,98)		
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	315.624.620,44	287.666.879,58	28.957.740,86	10,07		
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.05 Kepegawalan
 Unit Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawalan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawalan Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.004.591.215,44)	(18.502.399.074,58)	1.497.807.859,14	(8,10)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.004.591.215,44)	(18.502.399.074,58)	1.497.807.859,14	(8,10)
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.004.591.215,44)	(18.502.399.074,58)	1.497.807.859,14	(8,10)

Jambi, 31 Desember 2018
 KEPALA BADAN



H. HUSAIRI, S.IP, ME
 NIP. 196412011985031008



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05	Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 01	Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01	Badan Kepegawaian Daerah

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	(17.295.179.570,87)	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.004.591.215,44)	(18.502.399.074,58)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	(97.578.818,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(48.982.474,26)	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	171.770.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	36.295.577.533,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.021.015.454,43	(18.502.399.074,58)

Jambi, 31 Desember 2018

KEPALA BADAN

H. HUSAIRI, S.IP, ME

NIP. 196412011980031008

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan realisasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh OPD selama satu tahun periode pelaporan. Laporan keuangan OPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi penganggaran serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kondisi Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Ekonomi Makro
- 2.3. Kebijakan Keuangan OPD
- 2.4. Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar dan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2 Neraca
 - 5.1.3 Laporan Operasioal
 - 5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual

BAB VI. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Indikator kunci keberhasilan program pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari aspek perekonomian karena visi dan misi yang diemban Provinsi Jambi adalah visi dan misi ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi dapat dilihat dari perkembangan perekonomian daerah yang secara kuantitatif terlihat dari perkembangan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang disertai dengan pengendalian angka inflasi.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Laju Inflasi) dimana dalam praktik pembangunan daerah kondisi tersebut ditunjang sepenuhnya oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2017 dan pada tahun 2018.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik dengan ditandai semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2018 diarahkan kepada langkah-langkah penguatan ketahanan landasan ekonomi kerakyatan dalam koridor gerakan perang melawan kemiskinan secara komprehensif melalui beberapa kebijakan yang dititik beratkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2018.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan operasional yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendukung Terwujudnya Perencanaan, Penataan SDM Aparatur berdasarkan Kompetensi
- 2) Mendukung Terwujudnya Sistem Pengembangan SDM Aparatur berbasis Kompetensi Jabatan
- 3) Mendukung Terwujudnya SDM Aparatur yang Profesional
- 4) Mendukung Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegritas dan Disiplin
- 5) Mendukung Terwujudnya Sistem Reward dan Remunerasi Berbasis Jabatan dan Kinerja
- 6) Mendukung upaya Peningkatan Koordinasi antar tingkatan kepengurusan Organisasi KORPRI sebagai perekat persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua tingkat Kepengurusan Organisasi KORPRI

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perencanaan SDM Aparatur yang komprehensif dengan sistem rekrutmen terbuka
2. Meningkatkan sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan serta penempatan dan promosi jabatan yang kompetitif dan terbuka
3. Meningkatkan SDM Aparatur yang profesional, berintegritas, dan disiplin
4. Mewujudkan sistem remunerasi berbasis jabatan dan kinerja
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian

6. Meningkatkan dukungan hukum, efektifitas koordinasi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
7. Melakukan upaya untuk peningkatan kualitas informasi kepegawaian
8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan yang prima

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai, sebelum dimulainya kegiatan pada awal tahun anggaran disusun suatu Rencana Kerja (Performance Plan) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021. Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik di tingkat sasaran strategi maupun tingkat kegiatan. Dengan penyusunan rencana kerja yang memadai, akan memudahkan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap periode pelaksanaan sekaligus sebagai umpan balik penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya dengan mengacu pada visi, misi unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Pada tahun anggaran 2018, pencapaian target kinerja APBD yang dicapai melalui program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan, Penataan SDM Aparatur berdasarkan Kompetensi	Peningkatan PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi	25 %

2	Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis Kompetensi Jabatan	- Persentase Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu	24,5 %
		- Persentase Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	40 %
3	Terwujudnya sistem penempatan yang Kompetitif dan Terbuka	- Persentase Jumlah Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka	100 %
		- Persentase Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas telah lulus Talent Pool	55 %
4	Terwujudnya SDM Aparatur dan Profesional	Persentase Tingkat Pendidikan PNS Pemprov yang berpendidikan S1, S2 dan S3	47 %
5	Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegritas dan Disiplin	- Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang disampaikan kepada BKD	100 %
		- Persentase Tingkat Kehadiran PNS SKPD	80 %
		- Jumlah Nilai Prestasi Kerja PNS di SKPD 50 % dengan nilai "baik"	45 %
6	Terwujudnya Sistem Reward dan Remunerasi Berbasis Jabatan dan Kinerja	- Persentase jumlah PNS yang memenuhi syarat di SKPD 50 % menerima Satyalancana Karya Satya	45 %
		- Persentase jumlah PNS yang berprestasi yang dipromosikan dalam jabatan	60 %
		- Pemberian Remunerasi/Tunjangan Kinerja berdasarkan Evaluasi dan Kelas Jabatan	100 %

7	Meningkatkan Koordinasi antar tingkatan kepengurusan Organisasi KORPRI sebagai perekat persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua tingkat Kepengurusan Organisasi KORPRI	Persentase Koordinasi Program Kerja KORPRI se Provinsi Jambi	100%
---	---	--	------

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan diukur dengan menggunakan metode membandingkan Rencana Kinerja Anggaran sebagaimana dialokasikan dalam setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan realisasi yang dicapai selama tahun anggaran. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja keuangan tersebut adalah realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ). Untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja keuangan, maka akan diuraikan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2018.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

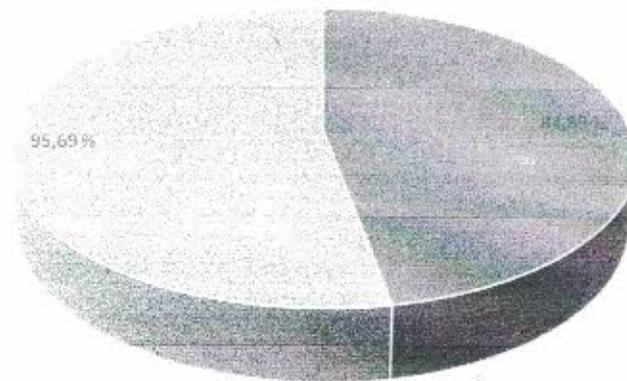
Tabel 3.1

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Target (Anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Tidak Langsung	12.783.056.428,00	10.852.018.078,00	84,89
2.1.1	Belanja Pegawai	12.783.056.428,00	10.852.018.078,00	84,89
2.2	Belanja Langsung	6.900.000.000,00	6.602.891.479,00	95,69
2.2.1	Belanja Pegawai	430.526.000,00	403.945.500,00	93,83
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.664.914.800,00	5.430.592.379,00	95,86
2.2.1	Belanja Modal	804.559.200,00	768.353.600,00	95,50

	Surplus (Defisit)	(19.683.056.428,00)	(17.454.909.557,00)	88,68
3	PEMBIAYAAN			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	0,00	0,00	0
	Pembiayaan	0.00	0,00	0,00

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Kinerja TA 2018



Selama periode tahun anggaran 2018, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan total sebesar Rp 19.683.056.428,00 dari total anggaran tersebut sampai pertanggal 31 Desember 2018 telah direalisasikan sebesar Rp 17.454.909.557,00. Realisasi anggaran ini mencapai 88,68 % dari total anggaran, kondisi ini dapat dikatakan baik yang mana selama tahun anggaran 2018 secara keseluruhan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak mengalami hambatan yang berarti. Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp 19.683.056.428,00) direalisasikan defisit sebesar (Rp 17.454.909.557,00) artinya

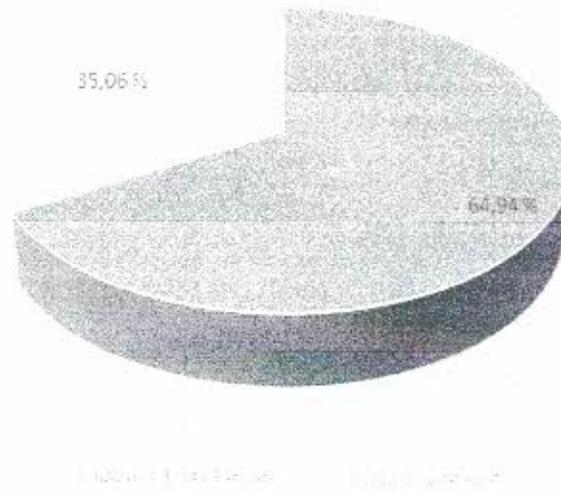
terdapat efisiensi yang menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp 2.228.146.871,00.

Tabel 3.2
Porsi Anggaran Belanja per Jenis Belanja

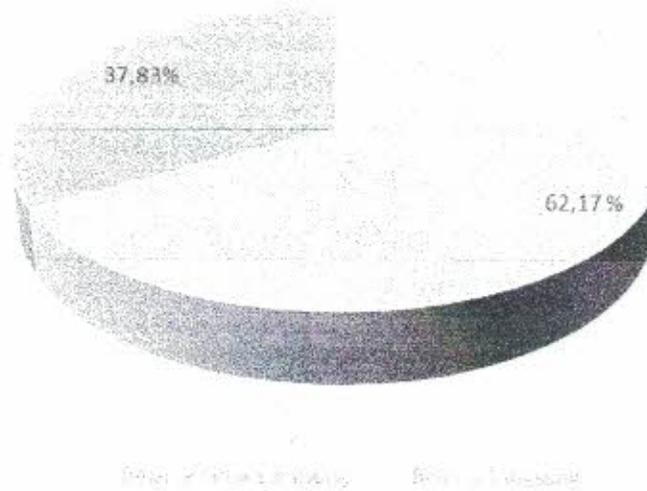
No	Uraian	Anggaran (Rp)	PORSI (%)	Realisasi (Rp)	PORSI (%)
1	2	3		5	6
2.1	Belanja Tidak Langsung	12.783.056.428,00	64,94	10.852.018.078,00	62,17
2.2	Belanja Langsung	6.900.000.000,00	35,06	6.602.891.479,00	37,83
		19.683.056.428,00	100,00	17.454.909.557,00	100,00

Secara porsi anggaran, belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2018 baik alokasi anggaran maupun realisasi anggaran masih didominasi oleh anggaran belanja tidak langsung, yaitu 64,94 % Belanja Tidak Langsung berbanding 35,06 % Belanja Langsung porsi alokasi anggaran dan 62,17 % Belanja Tidak Langsung berbanding 37,83 % Belanja Langsung pada porsi realisasi anggaran. Secara grafis porsi anggaran dapat dilihat pada grafik 3.2a.

Grafik 3.2a
Porsi Alokasi Anggaran TA 2018
per Jenis Belanja



Grafik 3.2b
Porsi Realisasi Anggaran TA 2018
per Jenis Belanja



Berdasarkan grafik 3.2a dan grafik 3.2b yang disajikan tersebut, terlihat jelas bahwa baik secara alokasi anggaran maupun secara realisasi anggaran, belanja langsung masih mendominasi belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp 12.783.056.428,00 dan direalisasikan sebesar Rp 10.852.018.078,00 atau sebesar 84,89 % belanja tidak langsung ini merupakan biaya pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018, sedangkan Belanja Langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun anggaran 2018, Belanja Langsung mendapat alokasi sebesar Rp 6.900.000.000,00 yang terdiri dari: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp 430.526.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 403.945.500,00 atau dengan bobot 93,83 %; 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 5.664.914.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.430.592.379,00 atau dengan bobot 95,86 %; 3) Belanja Modal sebesar Rp 804.559.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 768.353.600,00 atau dengan bobot 95,50 %.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

- a). Masih kurang ketatnya monitoring anggaran mulai dari proses perencanaan, jadwal pekerjaan, sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomi standar akuntansi pemerintahan.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 sebagai berikut :

4.3.1. Aset Lancar

- a). Kas dicatat sebesar nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya, Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran.
- b). Persediaan menggunakan metode pencatatan periodik seperti Alat

Tulis Kantor (ATK), Bahan Kebersihan dan Alat Listrik. Dengan Metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

4.3.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, Pengeluaran setelah perolehan dan penyusutan aset tetap :

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Akumulasi Penyusutan.

4.3.3. Aset Lainnya

Aset yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak reklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4.3.4. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

4.3.5. Belanja

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan dicantumkan dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

BAB V

PENJELASAN AKUN- AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran periode tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan – LRA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2018 tidak terdapat komponen untuk alokasi pos pendapatan, baik alokasi maupun realisasinya karena pada tahun anggaran 2018 tidak ada sumber pendapatan/penerimaan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

5.1.1.2. Belanja

Total belanja daerah yang dialokasikan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2018 sebesar **Rp 19.683.056.428,00** yang telah direalisasikan sebesar **Rp 17.454.909.557,00** dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
untuk Tahun Yang Berakhir Sampai 31 Desember 2018 dan 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
4	Pendapatan	0,00	0,00	0	0,00
5	Belanja	19.683.056.428,00	17.454.909.557,00	88,68	18.840.667.976,00
5.1	Belanja Operasi	18.878.497.228,00	16.686.555.957,00	88,39	18.218.904.918,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.783.056.428,00	10.852.018.078,00	84,89	10.844.413.851,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.095.440.800,00	5.834.537.879,00	95,72	7.374.491.067,00
5.2	Belanja Modal	804.559.200,00	768.353.600,00	95,50	621.763.058,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.818.000,00	511.193.600,00	93,49	471.813.058,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.741.200,00	257.160.000,00	99,77	149.950.000,00
	Surplus/Defisit	(19.683.056.428,00)	(17.454.909.557,00)	88,68	(18.840.667.976,00)
	Sisa Lebih Anggran (SILPA)		(2.228.146.871,00)		(18.840.667.976,00)

5.1.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2018 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 12.783.056.428,00 yang terdiri dari belanja pegawai untuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga per tanggal 31 Desember 2018 anggaran belanja pegawai tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 10.852.018.078,00 yang terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar

Rp 7.642.933.977,00 dan tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 3.216.108.845,00 atau setara dengan bobot 84,99 %.

Tabel. 5.1.1.2.1.1
Belanja Pegawai Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Total Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.859.042.822,00
2	STS Kelebihan Pembayaran	7.024.744,00
	REALISASI ANGGARAN (1-2)	10.852.018.078,00

Berdasarkan tabel. 5.1.1.2.1.1 jumlah realisasi pada belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS pada akun belanja pegawai (belanja tidak langsung) sebesar Rp 10.852.018.078,00. Jumlah tersebut merupakan belanja gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018. Pada posisi belanja gaji dan tunjangan, akun belanja tidak langsung ini terjadi kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kembali ke kas daerah sebesar Rp 7.024.744,00.

5.1.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun anggaran 2018 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.095.440.800,00 yang merupakan belanja barang dan jasa pada pelaksanaan program dan kegiatan, dari data pada laporan realisasi anggaran hingga per tanggal 31 Desember 2017 anggaran belanja barang dan jasa tersebut menunjukkan telah direalisasikan sebesar Rp 5.834.537.879,00 atau setara dengan

bobot 95,72 %. Sementara berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran didapat data realisasi sebesar Rp 5.834.687.879,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp 150.000,00 angka sebesar ini merupakan kelebihan pembayaran selama tahun anggaran 2018 dan kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke kas daerah.

5.1.1.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2018 Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp 804.559.200,00 yang merupakan belanja modal/pengadaan pada pelaksanaan program dan kegiatan, hingga per tanggal 31 Desember 2018 anggaran belanja modal tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 768.353.600,00 atau setara dengan bobot 95,50 % dengan rincian realisasi pada table. 5.3 sebagai berikut:

**Tabel. 5.1.1.2.2
Belanja Modal**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	72.600.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat kantor Lainnya	23.090.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Meubeleir	130.949.600,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	60.775.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.690.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	149.649.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	60.440.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.000.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	257.160.000,00
	Jumlah	768.353.600,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2018.

5.1.2. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.034.390.548,43 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1
Rincian Aset
per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Aset Lancar	3.226.400,00	2.512.120,00	714.280,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.757.712.533,43	1.280.774.846,13	476.937.687,30
Aset Lainnya	273.451.615,00	273.451.615,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.034.390.548,43	1.556.738.581,13	477.651.967,30

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.1.2.1 di atas terlihat bahwa terdapat penambahan aset yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari senilai Rp 1.280.774.846,13 pada tahun 2017 menjadi senilai Rp 1.757.712.533,43 pada akhir periode pelaporan (per tanggal 31 Desember 2018) atau bertambah senilai Rp 476.937.687,3. Penambahan Nilai Aset terjadi dapat dijelaskan bahwa pada aset lancar terjadi penambahan sebesar Rp 714.280,00 dari barang persediaan, selanjutnya pada aset tetap terjadi penambahan nilai

aset yang didapat dari akumulasi belanja modal selama tahun anggaran 2018 senilai Rp 842.544.782,00 dikurangi akumulasi penyusutan selama tahun anggaran 2018 sebesar Rp 365.607.094,70 sehingga didapat penambahan nilai aset tetap sebesar Rp 476.937.687,30.

Grafik 5.1.2.1
Perbandingan Aset per 31 Desember 2018 dan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi



5.1.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.226.400,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1
Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
Persediaan	3.226.400,00	2.512.120,00	714.280,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.226.400,00	2.512.120,00	714.280,00

5.1.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen adalah NIHIL.

5.1.4.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.757.712.533,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.3
Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Per 31 Desember 2018		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Tanah	0,00	0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin	4.696.201.879,30	3.663.173.575,17	1.033.028.304,13
	Gedung dan Bangunan	925.437.617,00	262.648.087,70	662.789.529,30
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.582.000,00	7.437.300,00	42.144.700,00
	Aset Tetap Lainnya	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.690.971.496,30	3.933.258.962,87	1.757.712.533,43

5.1.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 273.451.615,00 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4.1.4
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018

No	Akun	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
5	Aset Lain-Lain	273.451.615,00	273.451.615,00
		
	Jumlah	273.451.615,00	273.451.615,00

5.1.2.2. Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2018 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp 36.308.952.627,00**.

5.1.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp 36.308.952.627,00 yaitu Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 13.375.094,00 dan Kewajiban Untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 36.295.577.533,00.

5.1.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 adalah NIHIL.

5.1.4.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar **Rp 2.034.390.548,43** dengan uraian sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	(Rp 17.295.179.570,87)
- Penyesuaian/Mutasi	
- Penambahan	Rp 36.467.347.533,00
- Pengurangan	<u>(Rp 17.151.152.507,70)</u>
	<u>Rp 19.316.195.025,30</u>
- Ekuitas Akhir	Rp 2.021.015.454,43

5.1.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2018. Laporan Operasional (LO) tahun 2018 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2017 sudah berbasis akrual yang sudah menyajikan LO.

5.1.3.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.1
Rincian Realisasi Pendapatan – LO
Tahun 2018

No	*Pendapatan – LO	Jumlah
1	PAD – LO	-
2	Transfer – LO	-
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	-
	Jumlah	-

5.1.3.2. Beban

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 17.004.591.215,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3.2
Rincian Realisasi Beban Operasi
Tahun 2018

No	Beban Operasi	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai – LO	10.864.018.078,00
2	Beban Barang dan Jasa	5.823.948.517,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	316.624.620,44
	Jumlah	17.004.591.215,44

5.1.4. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar (Rp 17.295.179.570,87) merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2017.

5.1.4.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp 17.004.591.215,44).

5.1.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar

Penambahan/pengurangan Ekuitas juga bersumber dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dalam hal ini Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp 97.578.818,00), Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp 48.982.474,26), Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap sebesar Rp 171.770.000,00 dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 36.295.577.533,00.

5.2. Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas Untuk Entitas Akuntansil/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis AkruaI

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah menggunakan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI, dimana sebelumnya menggunakan basis kas menuju akruaI. Pada Laporan Keuangan berbasis AkruaI Aset dan Pendapatan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/timbulnya hak dan Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban sedangkan pada Laporan Keuangan berbasis kas Aset dan Pendapatan diakui pada saat adanya kas masuk/diterima bendahara dan Belanja diakui pada saat kas bendahara keluar. Laporan Keuangan berbasis akruaI pada saat rekonsiliasi per 31 Desember tahun bersangkutan Pendapatan yang tidak/belum tertagih akan timbul Piutang dan Belanja yang belum dibayarkan akan menimbulkan Utang/Beban, sedang pada Laporan Keuangan berbasis kas pada saat rekonsiliasi per 31 Desember tidak ada Piutang dan Utang/Beban yang timbul.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terletak di Jalan RM Nur Admadibrata No. 2 Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

6.2. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan susunan organisasi :

1. Unsur-unsur Organisasi BKD terdiri dari :
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi :
 - a) Kepala Badan
 - b) Sekretaris membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c) Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi membawahi :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
 3. Sub Bidang Mutasi
 - d) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir membawahi
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Kompetensi
 2. Sub Bidang Pengembangan Karir Struktural
 3. Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional

- e) Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korp Profesi membawahi
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kinerja
 - 2. Sub Bidang Disiplin
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Korp Profesi Pegawai ASN

- f) Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan membawahi
 - 1. Sub Bidang Sistem Informasi Pengolahan Data
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan

6.3. Penggantian Manajemen Dalam Tahun 2018

Dalam TA 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak terdapat penggantian Manajemen/Pimpinan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan handal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 secara keseluruhan.

g. Kepala Badan


H. HUSAIRI, S. IP, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19641201 198503 1 008